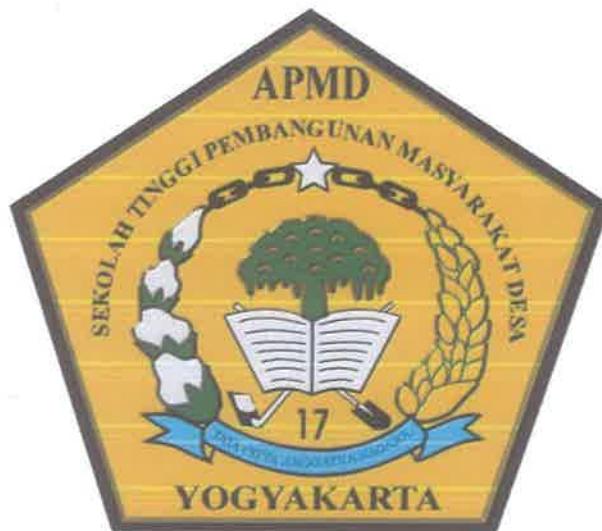


SKRIPSI

**MODEL TATAKELOLA PEMERINTAHAN KALURAHAN KEDUNGPOH,
KAPANEWON NGLIPAR, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**



VIRGILIUS RAYLUS

19520141

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD

“APMD” YOGYAKARTA

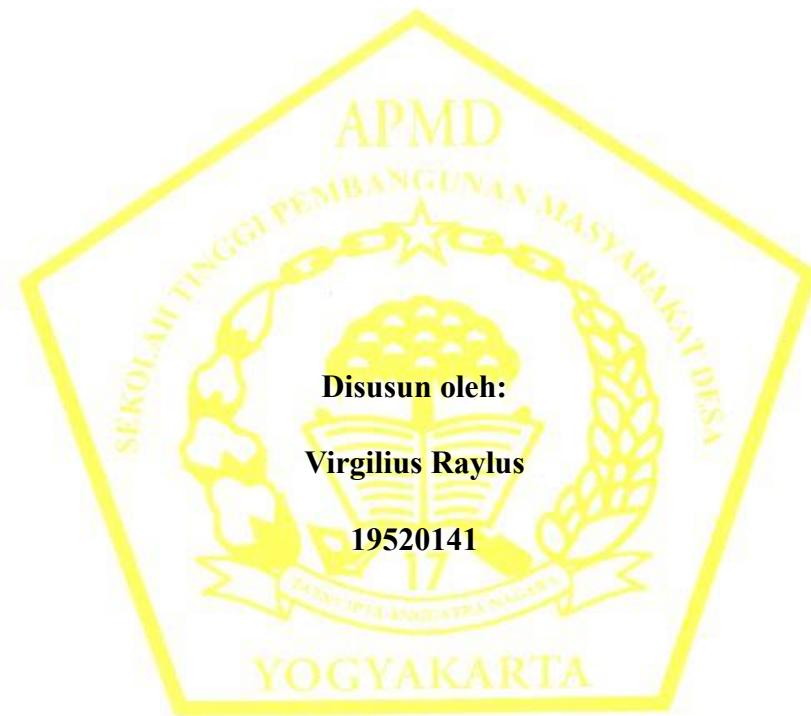
2024



**MODEL TATAKELOLA PEMERINTAHAN KALURAHAN KEDUNGPOH,
KAPANEWON NGLIPAR, KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD” YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Senin

Tanggal : 22 Juli 2024

Jam : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Utami Sulistiana, S.P., M.P.
Ketua Penguji / Pembimbing

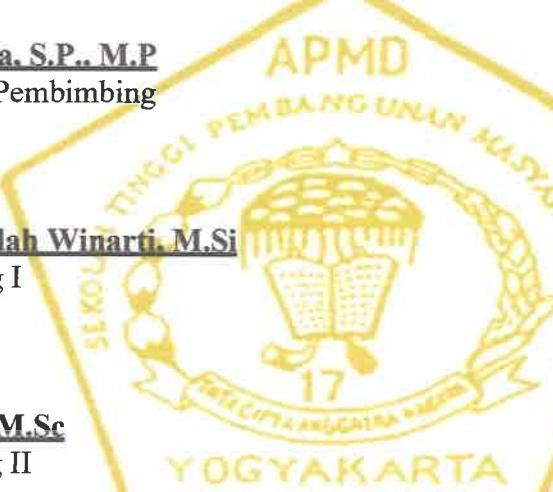


Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si
Penguji Samping I



Minardi, S.I.P., M.Sc
Penguji Samping II





Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Virgilius Raylus

Nim : 19520141

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ MODEL TATAKELOLA PEMERINTAHAN KALURAHAN KEDUNGPOH, KAPANEWON NGLIPAR, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



Virgilius Raylus

19520141

MOTTO

“ Serahkanlah Perbuatanmu Kepada TUHAN, Maka Terlaksanalah Segala Rencanamu “

(Amsal 16:4)

“Dan Apa Saja Yang Kamu Minta Dalam Doa Dengan Penuh Kepercayaan, Kamu Akan Menerimanya”

(Matius 21:22)

“Orang-Orang Yang Menabur Dengan Mencucurkan Air Mata, Akan Menuai Dengan Bersorak-Sorai. Orang Yang Berjalan Maju Dengan Menangis Sambil Menabur Benih, Pasti Pulang Dengan Sorak-Sorai Sambil Membawa Berkas-Berkasnya”

(Mazmur 126:5-6)

“Jikalau Engkau Terjatuh, Maka Bangkitlah Sendiri. Takkan Ada Orang Yang Mengulurkan Tangannya Agar Engkau Bangkit, Terkecuali TUHAN dan ORANGTUAMU”

(VirgilRaylus)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Segalanya atas setiap berkat karunia yang telah diberikan atas kebaikannya, sehingga saya bisa berproses dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar. Dengan hormat dan rasa syukur saya mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang dibanggakan dan disayangi diantaranya :

1. Kepada kedua orangtua yang saya sangat banggakan dan cintai, Bapak Fransiskus Yosaphat Ranthai dan Ibu Lusia Langudan yang tulus mencintai, menyayangi, membesarkan, dan mendidik dengan penuh rasa sabar. Terima kasih saya ucapkan sehingga sampai pada titik dimana semuanya selesai. Mungkin tidak ada kata lain yang lebih dari kata terima kasih, namun sekali lagi saya ucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya.
2. Kepada saudara kandung saya Christoforus Raylus, Oktavianus Jeranding Raylus, Viktor Bayu Raylus yang telah membimbing dan mengajarkan banyak hal yang tidak bisa saya tulis satu per satu.
3. Kepada seluruh keluarga besar, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih selalu memberikan dukungan, kepedulian dan semangat. Kiranya Tuhan membalas setiap kebaikan yang telah diberikan.
4. Kepada Dosen Pembimbing, Ibu Utami Sulistiana, S.P., M.P terima kasih telah membantu dan membimbing saya dengan sabar dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih atas saran dan arahan, serta meluangkan waktu disela kesibukannya.
5. Kepada seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Staff Akademik yang senantiasa melayani selama proses studi, serta membantu dan memberikan ilmu yang baik dan bermanfaat untuk kedepannya.
6. Kepada teman-teman, “RsB Mahasiswa Rantau” terima kasih karena telah menemani meskipun berbeda-beda tempat kuliah. Semoga kita semua bisa sukses.

7. Kepada teman-teman seperjuangan dijogja yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih karena sudah menemani, memberikan dukungan dan semangat. Semoga semuanya sukses.
8. Kepada cidut, terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini untuk memberikan semangat dan membantu menyelesaikan skripsi. Terima kasih karena sudah menjadi tempat ternyaman.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Segalanya atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Model Tatakelola Pemerintahan Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta”** dengan baik. Skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S-1) Ilmu Pemerintahan di STPMD “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari selesainya penyusunan skripsi ini tidak akan selesai dan tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan doa, bimbingan maupun saran yang berguna dalam penyusunan skripsi ini. Karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat penulis menimba ilmu dan pengetahuan akademik.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Ibu Utami Sulistiana, S.P., M.P selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan memberikan sumbangan pikiran, pengetahuan, serta dukungan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan memberikan ilmu dalam proses perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan banyak pengetahuan selama menempuh pendidikan.

7. Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si selaku dosen penguji samping I yang telah memberikan saran dan kritik terhadap skripsi.
8. Bapak Minardi, S.IP., M.Sc selaku dosen penguji samping II yang telah memberikan saran dan kritik terhadap skripsi.
9. Pemerintahan dan Masyarakat di Kalurahan Kedungpoh yang sudah memberikan tempat dan waktu untuk melaksanakan kegiatan penelitian.
10. Orangtua, pasangan serta teman-teman yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Demikian skripsi ini penulis buat, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis selalu terbuka atas saran dan segala kritikan yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 10 Juli 2024

Penulis

Virgilius Raylus

19520141

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	II
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	III
MOTTO	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN	V
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR GAMBAR	XI
DAFTAR TABLE	XII
DAFTAR BAGAN.....	XIII
INTISARI	XIV
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	6
F. Literatur Review	6
G. Kerangka Konsep	11
1. Governance	11
2. Good Governance	12
3. Pemerintahan Kalurahan	13
H. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Unit Analisis.....	15
3. Teknik Pengumpulan Data.....	16
4. Teknik Analisis Data	20
BAB II PROFIL KALURAHAN KEDUNGPOH.....	23
A. Sejarah Kalurahan	23

B.	Visi dan Misi	24
C.	Kondisi Geografis	25
D.	Kondisi Demografi.....	26
E.	Kondisi Perekonomian Kalurahan Kedungpoh	30
F.	Kondisi Pemerintahan Kalurahan Kedungpoh.....	31
G.	Kondisi Sarana dan Prasarana Kalurahan	33
H.	Potensi dan Daya Tarik Kalurahan.....	35
1.	Kedungpoh Park.....	35
2.	Desa Wisata Klayar	36
3.	Lumbung Mataraman Kedungpoh	36
BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		38
A.	Pendahuluan	38
B.	Analisis dan Pembahasan.....	38
1.	Model Tatakelola Pemerintahan Kalurahan Kedungpoh	38
2.	Implementasi Model Tatakelola Pemerintahan Kalurahan Kedungpoh.....	45
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		48
A.	Kesimpulan	48
B.	Saran	49
DAFTAR PUSTAKA		51
LAMPIRAN.....		53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kedungpoh Park.....	35
Gambar 2. 2 Desa wisata Klayar	36
Gambar 2. 3 Lumbung Mataraman Kedungpoh.....	37
Gambar 3. 1 Uploadan APBKal.....	41
Gambar 3. 2 Kedungpoh Park dan Pasar Desa	43

DAFTAR TABLE

Table 1. 1 Deskripsi Informan Penelitian	16
Table 2. 1 Data Penduduk Per Padukuhan.....	26
Table 2. 2 Data Penduduk Berdasarkan Usia.....	27
Table 2. 3 Pendidikan Penduduk Kedungpoh	28
Table 2. 4 Pekerjaan dan mata pencaharian masyarakat Kedungpoh.....	29
Table 2. 5 Data Penduduk berdasarkan Agama.....	29
Table 2. 6 Sumber Daya Alam Kalurahan Kedungpoh	30
Table 2. 7 Penggunaan Lahan Kalurahan Kedungpoh	30
Table 2. 8 Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	31
Table 2. 9 Prasarana Umum.....	33
Table 2. 10 Prasarana Kesehatan	33
Table 2. 11 Prasarana Pendidikan	34
Table 2. 12 Prasarana Ekonomi.....	34
Table 2. 13 Prasarana Umum.....	34

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Struktur Pemerintahan Kalurahan Kedungpoh..... 32

INTISARI

Kalurahan Kedungpoh memiliki permasalahan karena pembangunan hanya terfokus kepada beberapa padukuhan tertentu dengan kebijakan ataupun keputusan terlihat banyak diambil oleh Pemerintah Kalurahan. Dalam tatakelola Pemerintahan Kalurahan Kedungpoh juga terdapat masalah dalam pembaharuan data khususnya di *website* seperti struktur organisasi pemerintahan desa yang *di-update* terakhir pada 29 Juli 2013, belum adanya pembaharuan ketua BUMKal beserta anggotanya oleh pihak Pemerintah Kalurahan dan juga belum adanya pembaharuan data kependudukan yang dimiliki.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model tatakelola yang ada di Pemerintahan Kalurahan Kedungpoh dan menjelaskan kendala atau faktor yang mendukung dan menghambat implementasi model tatakelola pemerintahan yang ada di Kalurahan Kedungpoh. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif. Pada penelitian ini informan dipilih melalui teknik *purposive sampling* dengan informan berjumlah enam orang. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan metode Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Triangulasi. Dengan Teknik Analisis data yaitu Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, Penarik Kesimpulan.

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa model tatakelola pemerintahan di Kalurahan Kedungpoh adalah *desentralistik*. Model ini mendorong tingkat demokrasi yang tinggi seperti partisipasi masyarakat dalam perencanaan melalui MusKal, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaporan. Meskipun demikian, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya masih perlu ditingkatkan. Faktor pendukung dalam pelaksanaan model *desentralistik* ini termasuk dukungan dari pemerintah kalurahan melalui *workshop* untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta kerjasama dengan BUMKal dan pihak lain seperti kantor pos. Namun, terdapat juga faktor kendala yang mempengaruhi pelaksanaan *desentralistik*, seperti kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada, masalah pembaharuan data yang tidak dilakukan dalam waktu yang lama, dan konflik politik lokal yang berlebihan di pemerintahan kalurahan. Hal ini menyebabkan proses tatakelola pemerintahan mengalami hambatan. Secara keseluruhan, meskipun model *desentralistik* telah diterapkan dengan baik dalam beberapa aspek, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi tatakelola pemerintahan di Kalurahan Kedungpoh.

Kata kunci: *Governance, Implementasi, Pemerintah Kalurahan, Tatakelola.*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia merupakan pemerintah yang mengatur sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945. Pemerintah diperlukan untuk mengelola, melindungi, dan memenuhi kebutuhan rakyatnya karena dalam kehidupan negara, negara memiliki kekuasaan yang eksklusif dan memaksa. Dengan adanya pemerintahan, semua bagian wilayah termasuk batasnya dapat diatur dan dipantau dengan efektif. Selain itu, setiap bagian wilayah memiliki struktur pemerintahan sendiri mulai dari tingkat desa dan kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat (Sugiman, 2018). Dalam wilayah pemerintah Indonesia, wilayah pemerintahan yang terkecil dan yang paling dekat dengan masyarakat adalah wilayah desa. Pemerintah desa diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Bahwa desa mempunyai hak asal usul dan hak tradisional untuk mengatur dan menjaga kepentingan masyarakat lokal juga membantu mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang digariskan dalam UUD 1945.

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa yang terdiri atas kepala desa atau disebut dengan nama lain, dan dibantu oleh perangkat desa atau disebut dengan nama lain, melaksanakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Dalam pemerintahan desa, ada prinsip-prinsip berikut: hukum yang kuat, operasi pemerintahan yang baik, kepentingan umum yang baik, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipasi (Solekhan 2014:51). Pemerintahan desa, sebagai bagian dari

penyelenggara pemerintahan desa, memiliki tugas untuk membangun dan membina masyarakat serta membina perekonomian desa.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan menetapkan bahwa kalurahan adalah sebutan untuk desa di wilayah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah dan harta kekayaan sendiri. Setelah nama desa berubah menjadi kalurahan. Sehingga dalam kata lain kalurahan adalah desa namun berbeda nama khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun berubah nama bukan berarti tugas dan kewajibannya berbeda. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki reformasi kalurahan yang dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan reformasi kalurahan. Reformasi ini mencakup dua pendekatan: reformasi birokrasi kalurahan dan reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan. Dalam Reformasi Birokrasi Kalurahan mengacu dalam upaya perbaikan tatakelola dengan fokus pada kegiatan yang sederhana dan dapat diimplementasikan dengan mudah, tetapi memiliki potensi besar untuk menghasilkan perubahan.

Tatakelola pemerintahan yang baik di tingkat kalurahan sangat penting karena desa atau kalurahan adalah unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Ketika Pemerintah Kalurahan berfungsi dengan baik, masyarakat dapat merasakan dampak positifnya melalui peningkatan layanan publik, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Pemerintah memerlukan tatakelola pemerintahan yang baik, merupakan rancangan yang mencangkup proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara kolektif. Ini merupakan suatu kesepakatan yang dicapai antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dalam pemerintahan

kalurahan langkah awal yang harus dilakukan adalah memantau setiap prosedur dalam skema yang dijalankan dari mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, harus sesuai dengan standar tatakelola yang baik. Tatakelola yang baik menekankan prinsip transparansi, akuntabilitasi, partisipasi, dan efektivitas dalam pengambilan keputusan, sehingga menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat desa terutama akan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan tatakelola pemerintahan yang ada di kalurahan terdapat sebuah model kekuasaan yang ada di pemerintah kalurahan. Model kekuasaan di pemerintah kalurahan atau desa merupakan bagian dari struktur pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan masyarakat di tingkat lokal dapat dikelola secara efektif dan efisien. Model kekuasaan di pemerintah kalurahan atau desa memainkan peran penting dalam memperkuat kemandirian lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memastikan bahwa pembangunan di tingkat terendah dari hierarki pemerintahan dapat terjadi secara inklusif dan berkelanjutan. Dalam tatakelola pemerintahan, Jhon Gerring dan Strorm C. Thacker menyatakan bahwa terdapat 4 model *governance*, yakni: (1) model anarki, sebuah konteks dimana otoritas pemerintah memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan, Tingkat demokrasi yang rendah, dan sering kali diwarnai oleh konflik, (2) model sentralistik, sebuah situasi dimana keputusan diambil secara terpusat dengan tingkat demokrasi yang rendah, (3) model desentralistik, kekuasaan politik yang rendah, namun tingkat demokrasi tinggi, (4), model sentripetal, kekuasaan politik yang kuat dalam pengambilan keputusan, dengan tingkat demokrasi yang sangat tinggi (Gerring & Thacker, 2008).

Kalurahan Kedungpoh mempunyai permasalahan dalam pembangunan yang hanya terfokus kepada beberapa padukuhan tertentu dengan kebijakan ataupun keputusan terlihat banyak diambil oleh pemerintahan kalurahan. Ini dibuktikan dengan penyampaian oleh salah satu orang yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya, beliau mengatakan bahwa:

“Pembangunan di Kalurahan Kedungpoh belum merata, karena di beberapa padukuhan masih terdapat aspirasi yang belum dapat terealisasi.” (wawancara 14 Desember 2023)

sama halnya juga yang disampaikan oleh selaku tokoh masyarakat yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya, beliau mengatakan bahwa

“Pemerintah Kalurahan Kedungpoh, pada saat musrenbangkal, tidak hanya menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh Bamuskal, tetapi juga memiliki rencana pembangunan sendiri yang akan diajukan kepada setiap padukuhan. Menurut saya, hal ini membuat pemerintah kalurahan tampak lebih dominan selama musrenbangkal berlangsung.” (wawancara 14 Desember 2023).

Jika menanyakan tentang hal yang berkaitan dengan kebijakan kalurahan kepada warga maka warga selalu mengatakan yang mengarah jika ditanyakan saja kepada pihak kalurahan langsung. Dalam tatakelola Pemerintahan Kalurahan Kedungpoh juga terdapat masalah dalam pembaharuan data khususnya di *website* seperti struktur organisasi pemerintahan desa yang *update* terakhir pada 29 Juli 2013, belum adanya pembaharuan ketua Badan Usaha Milik Kalurahan beserta anggotanya yang hanya berjumlah lima orang oleh pihak Pemerintah Kalurahan Kedungpoh dan juga belum adanya pembaharuan data kependudukan yang dimiliki. Seharusnya Pemerintah Kalurahan Kedungpoh memperbaharui data organisasi yang dimiliki karena hampir 10 tahun belum juga diperbaharui, juga pembaharuan data kependudukan sehingga orang luar yang ingin mengetahui ataupun memerlukan data administratif menjadi lancar, sehingga jika diperlukan maka data langsung tersedia, dan juga pembaharuan keanggotaan Badan Usaha Milik Kalurahan karena tujuan Badan Usaha Milik Kalurahan adalah untuk meningkatkan ekonomi pedesaan dan meningkat usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi pedesaan.

Melihat permasalahan Pemerintah Kalurahan Kedungpoh dalam model pemerintahan dan tatakelola pemerintahan ini sejalan dengan Mazhab Timoho yaitu *Governance*. Konsep *Governance* mengacu pada cara pemerintah,

lembaga politik, lembaga ekonomi, dan lembaga sosial berhubungan satu sama lain untuk mencapai kesepakatan tentang bagaimana mengatur proses pemerintahan untuk mencapai tujuan negara dan masyarakat dengan partisipasi yang wajar. *Governance* yang disampaikan mencakup kondisi, aktivitas, dan kegiatan dalam melaksanakan negara atau pemerintahan, pembangunan masyarakat dan ekonomi yang melibatkan pemerintah, komunitas, dan bisnis swasta. Konsep negosiasi, kolaborasi, konsolidasi, partisipasi, transpransi, responsivitas, rente, privatisasi, *free rider*, dan bandit ideal dalam kondisi ini. (Eko, 2020:2).

Melihat dari kenyataan yang ada di Kalurahan Kedungpoh maka peneliti sangat tertarik untuk melihat model pemerintahan dan tatakelola Pemerintahan Kalurahan Kedungpoh, sehingga menjadikan sebuah judul penelitian yaitu “Model Tatakelola Pemerintahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat bermanfaat untuk membatasi objek penelitian dan mencegah peneliti terjebak dalam banyak data lapangan yang dikumpulkan. Sehingga fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Model Tatakelola Pemerintahan Kalurahan Kedungpoh
2. Implementasi Model Tatakelola pemerintahan Kalurahan Kedungpoh

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini, berdasarkan latar belakang masalah di atas adalah bagaimana Model Tatakelola Pemerintahan Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan model tatakelola yang ada di Pemerintahan Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk mendeskripsikan kendala atau faktor yang mendukung dan menghambat implementasi model tatakelola pemerintahan yang ada di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berharap dapat memberikan dampak terhadap pengembangan studi-studi mengenai model tatakelola yang ada di pemerintahan kalurahan. Juga, penelitian ini berharap mempu menjadi acuan bagi para peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini berharap dapat memberikan dampak agar Pemerintahan Kalurahan Kedungpoh bisa mewujudkan Tatakelola pemerintahan yang baik.

F. Literatur Review

Berdasarkan penelusuran literatur dari berbagai jurnal dan tinjauan penelitian sebelumnya, penelitian yang akan dilakukan akan digunakan sebagai acuan untuk membedakan penelitian saat ini dari penelitian sebelumnya. Adapun kajian terdahulu yang menjadi kajian dalam penelitian yaitu :

Pertama, penelitian Rantepasang, A., Kaawoan, J. E., & Rengkung, F. R. yang berjudul *Peran Lurah Dalam Mewujudkan Tatakelola Pemerintah Yang Baik Suatu Studi Di Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung*. Jurnal EksekutiF, 1(1). (2017). Metode Penelitian yang digunakan adalah

kualitatif deskriptif. Hasil penelitian adalah Penelitian Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kecamatan Sagerat Terkait Profesionalisme Dan Transparansi Pemerintahan menunjukkan bahwa penyelenggara pemerintahan di Kecamatan Sagerat kurang profesional. Akibat tidak adanya tarif yang jelas, prosedur pelayanan menjadi rumit, tidak tepat waktu, dan lambat dalam memberikan pelayanan publik kepada pegawai pemerintah kecamatan. Aparatur administrasi pemerintahan Kecamatan Sagerat masih kurang transparan. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan memadai serta menjamin informasi tersebut tersampaikan secara efektif kepada masyarakat.

Kedua, penelitian Hendi Sandi Putra yang berjudul *Tatakelola pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri*. Jurnal Politik Muda, 6 (2). (2017) Pp. 110-119. Metodologi penelitian adalah kualitatif dengan pengumpulan data kajian Pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian Dalam menjalankan pemerintahan di Kelurahan Sagerat, masih ada kekurangan dalam transparansi dari para penyelenggara pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam mendapatkan informasi yang tepat dan memadai, serta dalam menjamin bahwa informasi tersebut disampaikan dengan efektif kepada mereka.

Ketiga, penelitian Pertiwi, A., Dema, H., Mustanir, A., & Anugrah, E. Yang berjudul *Penerapan E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Tatakelola Pemerintahan Desa (Studi pada Pemerintahan Desa Bulo Timoreng)*. PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, 9(3), 130-139. (2021). Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian Implementasi e-government dalam meningkatkan keterbukaan menggunakan sistem aplikatif. Proses ini melibatkan koordinasi dengan masyarakat untuk memahami tantangan atau keuntungan yang muncul dalam menerapkan e-government untuk mencapai transparansi dalam tatakelola pemerintahan Desa

Bulo Timoreng. Penerapan e-government untuk meningkatkan transparansi dalam tatakelola pemerintahan desa di Desa Bulo Timoreng belum optimal karena terkendala oleh kurangnya fasilitas yang tersedia di kantor desa. Contohnya, jaringan wifi sering mengalami gangguan karena penggunaan yang berlebihan, sehingga pelayanan administrasi tidak mencapai tingkat maksimal. Selain itu, transparansi dalam tatakelola pemerintahan desa dipengaruhi oleh kurangnya keterbukaan pemerintah desa terhadap warga setempat. Contohnya, informasi mengenai penggunaan situs web desa belum disampaikan secara efektif kepada masyarakat, sehingga masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui informasi tersebut.

Keempat, penelitian K. C. Susila Wibawa. Yang berjudul *Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik*. Administrative Law and Governance Journal, vol. 2, no. 2, pp. 218-234, Jun. (2019). Hasil penelitian Berdasarkan bukti empiris yang ada, Pelayanan publik di Indonesia tampaknya belum mencapai kualitas terbaiknya. Kualitas pelayanan publik yang tidak sesuai harapan masyarakat dapat mereduksi tujuan penting pemerintah dalam memberikan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan transparansi informasi publik mengenai penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu langkah yang harus segera dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik dan unggul. Salah satu kunci utama perbaikan tatakelola pemerintahan adalah memahami prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik. Bagaimana kinerja pemerintah dapat diukur dengan memahami prinsip-prinsip tersebut. Salah satu prinsip utama tatakelola pemerintahan yang baik adalah keterbukaan informasi, yang dapat membantu membangun pelayanan publik yang baik dan unggul. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), menjadi landasan bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat

dipertanggungjawabkan. Pelayanan publik yang berbasis pada keterbukaan informasi akan membantu menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik.

Kelima, penelitian Salindeho, A. C. yang berjudul *Tatakelola Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan Di Kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*. POLITICO: Jurnal Ilmu Politik, 9(2). (2020). Metode adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan kalurahan,instrument yang ada, dan Lembaga pemberdayaan masyarakat masih kurang transparan. Pada saat musrembang, kepala desa tidak selalu jujur dalam memberikan informasi tentang berapa anggaran yang dialokasikan dan berapa besaran yang dialokasikan untuk setiap program yang akan dilaksanakan. Karena pemerintahan kalurahan tidak banyak malakukan sosialisasi kepada masyarakat, maka partisipasinya masih rendah. Namun kewajiban melaporkan setiap tindakan yang dilakukan dinilai cukup baik dari segi akuntabilitas

Keenam, penelitian Utami, L. T., Syafri, W., & Mulyati, D. yang berjudul *Tatakelola Pemerintahan Kolaborasi Dalam Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil Di Kota Administrasi Jakarta Selatan*. Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ), 3(6), 3683–3694. (2022). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian Hasil dari tatakelola pemerintahan kolaboratif dalam pelayanan izin usaha mikro dan kecil menunjukkan pada dimensinya. Pada dimensi Struktur Jaringan, terlihat bahwa struktur yang ada di sini tidak hierarkis, melainkan lebih datar dan tidak ada monopoli. Semua pihak memiliki peran yang setara dalam menjalankan hak dan kewajiban serta aksesibilitasnya baik dari pihak UP PTSP maupun dari pihak Kelurahan. Dengan demikian, struktur jaringan yang ada dalam kolaborasi ini dapat dianggap sebagai bentuk self-governance. Pada dimensi Komitmen terhadap Tujuan Bersama, perlu diperkuat komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan untuk mempermudah proses perizinan usaha, terutama di Kelurahan Ulujami.

Ketujuh, Penelitian Eka Setyowati yang berjudul *Tatakelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM): Studi Tiga Desa Di Kabupaten Malang*. JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Vol 9, No 2. (2019). Metode Penelitian yang digunakan Kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitiannya adalah Dari Indeks Desa Membangun pada tahun 2017, diketahui bahwa terdapat 12 desa di kecamatan Tumpang yang masuk dalam kategori berkembang. Sementara itu, terdapat 2 desa yang dikategorikan sebagai maju dan 1 desa sebagai mandiri. Hal ini menunjukkan tidak ada satupun desa di kecamatan tumpeng yang mempunyai skor indeks ketahanan sosial tertinggal atau sangat tertinggal. Secara persentase, daerah maju 80 persen, maju 13,3 persen, dan mandiri 6,7 persen. Desa tumpeng merupakan desa mandiri menurut indeks desa dalam penyelenggaraan pemerintah. Dibandingkan dengan desa malangsuko dan pulungdowo yang memiliki indeks Pembangunan desa lebih rendah, warganya lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan desa.

Kedelapan, penelitian Hafiez. S., Rudy. S., Sigit. A. W., Harjanti. W. Yang berjudul *Praktik Pengelolaan dan Tatakelola Pemerintahan Desa Dlingo di Kabupaten Bantul: Pembelajaran dari Desa Percontohan*. JATI : Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia. Vol 1, No 1: March. (2018). Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga kategori permasalahan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa: 1. Permasalahan dalam oenyusunan rencana strategis, 2. Masalah pelaporan keuangan dan kinerja, dan 3. Permasalahan dalam pencapaian kinerja desa. Untuk memperoleh pembinaan dan pendampingan, pemerintahan desa dlingo juga aktif mengirimkan jajarannya untuk mengikuti Pendidikan lanjutan guna meningkatkan kinerja desa dan kemandiri desa dlingo. Hal ini dilakukan melalui pendekatan persuasive untuk mendorong masyarakat desa menjadi lebih mandiri dan bangga terhadap desanya sendiri.

Hal ini bertujuan untuk mendorong mereka menjadi orang yang terlibat langsung dalam Pembangunan desa.

Secara umum, kedelapan penelitian memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Kesamaan penelitian terletak pada tatakelola pemerintahan, namun penelitian yang dilakukan peneliti ini memiliki perbedaan karena peneliti menambahkan model pemerintahan dari aspek mazhab timoho yaitu Governance. Sehingga peneliti dalam hal ini berfokus kepada model tatakelola pemerintahan kalurahan yang ada di Kalurahan Kedungpoh.

G. Kerangka Konsep

1. Governance

Governance secara khusus dapat dipahami sebagai tatakelola yang mengarah pada konsep kelembagaan eksklusif seperti yang ditulis oleh (Eko:2021) dalam jurnal “Making Government: Reinventing the Government Science”, pemerintahan tanpa pemerintahan atau hubungan dengan pihak luar akan menjadi otokratik-birokratik seperti dunia perkantoran. Dalam pemerintahan, governance di definisikan sebagai tata pemerintahan, yang mencakup interaksi pemerintah-negara dengan Masyarakat sipil dan ekonomi (politik, ekonomi, atau sipil), sehingga tidak terbatas pada pemerintahan sebagai kantor (Eko, 2020:1).

Konsep *Governance* mengacu pada cara pemerintah, lembaga politik, lembaga ekonomi, dan lembaga sosial berhubungan satu sama lain untuk mencapai kesepakatan tentang bagaimana mengatur proses pemerintahan untuk mencapai tujuan negara dan masyarakat dengan partisipasi yang wajar. *Governance* juga mencakup kondisi, aktivitas, dan kegiatan dalam melaksanakan pemerintahan atau negara, pembangunan masyarakat, dan ekonomi yang melibatkan pemerintah, Masyarakat, dan swasta. Konsep negosiasi, kolaborasi, konsolidasi, partisipasi, transpransi, responsivitas, rente, privatisasi, free rider, dan bandit ideal dalam kondisi ini (Eko, 2020:2).

Pada *Governance* terdapat sebuah tatakelola pemerintahan yang harus sejalan dan tidak ada yang mendominasi untuk berkuasa. Dalam tatakelola pemerintahan, Jhon Gerring dan Strorm C. Thacker menyatakan bahwa terdapat 4 model *governance*, yakni: (1) model *anarki*, sebuah konteks dimana otoritas pemerintah memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan, Tingkat demokrasi yang rendah, dan sering kali diwarnai oleh konflik, (2) model *sentralistik*, sebuah situasi dimana Keputusan diambil secara terpusat dengan tingkat demokrasi yang rendah, (3) model *desentralistik*, kekuasaan politik yang rendah, namun tingkat demokrasi tinggi, (4), model *se*, kekuasaan politik yang kuat dalam pengambilan Keputusan, dengan tingkat demokrasi yang sangat tinggi (Gerring & Thacker, 2008).

2. Good Governance

Dalam bahasa Inggris, istilah "*govern*" berasal dari bahasa Latin "*gubernare*", Arti dari *govern* adalah mengarahkan, mengendalikan, atau memerintah. Istilah ini digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyatakan memerintah dengan kewenangan atau otoritas yang tepat.

Menurut Mardiasmo (2018:23), *good governance* merujuk pada pelaksanaan manajemen pembangunan yang kokoh dan bertanggung jawab, selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan efisiensi pasar. Ini melibatkan pencegahan kesalahan dalam alokasi dan investasi, serta upaya untuk menghindari korupsi baik secara politik maupun administratif. Selain itu, disiplin anggaran perlu diterapkan untuk membentuk kerangka hukum dan politik yang mendukung perkembangan aktivitas dunia usaha. Sedangkan Menurut Rizal Djamil (2018:395), *good governance* dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang efektif dan bersih dalam suatu organisasi, yang diharapkan oleh masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsipnya, serta mampu mengatasi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dan dari teori-teori yang dibahas, dapat disimpulkan bahwa *good governance* didefinisikan sebagai konsep penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ini melibatkan upaya kolektif dalam kerangka kebijakan negara untuk mengelola berbagai sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Menghasilkan kebijakan yang sah, tujuan utamanya adalah mencapai kesejahteraan rakyat dan mengelola pemerintahan dengan baik yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan efisiensi pasar, serta melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan sesuai dengan prinsipnya akuntabel terhadap publik secara profesional, transparan, bertanggung jawab, dan adil.

Ada sembilan tanda pemerintahan yang baik. Diantaranya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, consensus, kesetaraan dan keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Menurut Sedarmayanti (2014:5), ciri-ciri pemerintahan yang baik meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan penegakan hukum

3. Pemerintahan Kalurahan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2 tahun 2020 menetapkan bahwa Kalurahan adalah sebutan untuk Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah dan harta kekayaan sendiri.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 1 ayat 2 tentang Desa, menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan pasal 1 ayat 3 penyelenggaranya adalah Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah desa, sebagai aktor dan institusi

yang berkewenangan, memiliki hak untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat. Namun, mengatur dan mengurus memiliki beberapa arti, seperti:

- a. Menerbitkan dan menaati peraturan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk mengikat semua pihak yang berkepentingan.
- b. Tanggungjawabnya meliputi pemecahan masalah dan perencanaan, penganggaran, serta melaksanakan kegiatan pengembangan dan pelayanan.
- c. Membuat keputusan dan melaksanakan alokasi sumber daya untuk kegiatan atau layanan Pembangunan, termasuk menyediakan sumber daya kepada penerima manfaat.
- d. Mengelola berarti menjalankan, melaksanakan, dan memelihara pelayanan publik yang telah diatur.

Pemerintah desa bertanggung jawab atas pengaturan publik, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan mengatur penggunaan aset publik seperti pendidikan, kesehatan, jalan, sungai, laut, hutan, kebun, air, udara, uang, dan lain-lain. Namun, pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan pelayanan publik, serta untuk meningkatkan kekayaan dan potensi masyarakat (Eko, 2015:101).

H. Metode Penelitian

Setiap penelitian bertujuan untuk menyelesaikan masalah tertentu dan mencapai hasil yang diinginkan. Namun, karakterisasi sebuah penelitian sebagai ilmiah atau non ilmiah bergantung pada cara berpikir dan metode yang digunakan dalam prosesnya. Metode penelitian adalah prosedur yang digunakan dalam suatu studi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hasil penelitian, yang pada gilirannya dapat mengembangkan pola pikir yang analitis, kreatif, dan kritis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah proses mencari jawaban atas pertanyaan tertentu. Peneliti menggunakan pendekatan ilmiah dan pengamatan untuk menemukan jawaban. Metode ini mencakup definisi dan redefinisi masalah, pembuatan hipotesis atau jawaban sementara, dan sampai pada kesimpulan. Peneliti harus berhati-hati dengan Kesimpulan mereka karena mungkin tidak sejalan dengan hipotesis yang diusulkan kemudian menggunakan pemikiran kritis untuk menemukan kebenaran tentang kasus yang diamati atau diteliti.

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi dan pemikiran individu dan kelompok (Sukmadinata 2015:60). Penelitian ini bersifat kualitatif yang fokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial atau budaya dari sudut pandang partisipan sehingga menjelaskan bagaimana Model Tatakelola Pemerintahan Kalurahan kedungpoh, kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, D.I Yogyakarta.

2. Unit Analisis

a. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta

b. Objek Penelitian

Menurut Spradley, situasi sosial atau situasi sosial adalah objek penelitian kualitatif yang terdiri dari tiga elemen yang berinteraksi secara sinergis: tempat, pelaku, dan aktivitas. (Sugiyono, 2015:229). Dari penjelasan di atas, maka objek penelitian adalah model tatakelola Pemerintahan Kalurahan Kedungpoh dan Implementasi model tatakelola Pemerintahan Kalurahan Kedungpoh

c. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, Subjek penelitian adalah karakteristik, sifat, atau nilai individu, objek, atau kegiatan yang memiliki variabel tertentu yang harus dipelajari dan ditentukan oleh peneliti. Subjek penelitian adalah batas penelitian di mana peneliti dapat menentukannya dengan objek, hal, atau orang yang diteliti. Informan penelitian adalah subjek penelitian. Penelitian ini memerlukan informan yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi setting penelitian. Informan dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan tujuan agar dapat memberikan data atau informasi yang relevan dengan subjek penelitian. Dengan informan peneliti:

Table 1. 1 Deskripsi Informan Penelitian

No	Nama	Usia (Tahun)	Tingkat Pendidikan	Jabatan/Pekerjaan
1	Ruslan Mudzakir	44	S-1	Carik
2	Yusuf Efendi	39	S-1	Kaur Denarta
3	Sugiyanto	44	SLTA	Tenaga Harian Lepas dan anggota BUMKal
4	Aries Widyawati	42	S-1	Guru dan Bendahara BUMKAI
5	Basuki	45	SLTA	Masyarakat
6	Owen Rossi	22	Mahasiswa	Masyarakat

3. Teknik Pengumpulan Data

Setiap penelitian mempunyai tujuan utama untuk memperoleh data, teknik pengumpulan data merupakan Langkah terpenting dalam suatu penelitian. Data penelitian primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi mendalam. Data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi tertulis atau audio, foto atau gambar dari lokasi penelitian, dan penelitian literatur

seperti jurnal atau buku yang berkaitan dengan topik penelitian yang ingin diteliti.

a. Observasi

Dibandingkan dengan metode pengumpulan data seperti wawancara dan kuisioner, (Sugiyanto 2014:145) menganggap observasi sebagai metode pengumpulan data yang berbeda. Selain itu, metode observasi atau observasi yang mengacu pada aktivitas manusia sehari-hari dengan menggunakan panca Indera, digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati secara langsung peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan kemudian mencatat tingkah laku dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam keadaan sebenarnya. Guba dan Lincoln dalam (Moleong 2018: 174). Melalui pengamatan dan pencatatan fenomena yang diselidiki, metode observasi memungkinkan pengumpulan data. Hal ini tidak hanya terbatas pada apapun yang dilihat subjek penelitian secara langsung atau tidak langsung (Sugiyono 2016: 203).

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung di tempat penelitian, penelitian mengamati Model Tatakelola Pemerintahan Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada observasi yang dilakukan peneliti mengalami kendala untuk bertemu informan yaitu, pak lurah yang sulit dihubungi karena tidak menggunakan media sosial whatsapp, dan peneliti sulit untuk menemui karena pak lurah sering tidak ada di kantor kalurahan, maupun sakit pada saat peneliti melakukan observasi. Peneliti disini melakukan observasi sudah lima kali namun pak lurah masih saja tidak ada.

b. Wawancara

Sugiyono (2016:194) mengatakan bahwa wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studipendahuluan untuk menentukan masalah yang harus diteliti dan jika peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang responden. Dalam metode ini, peneliti melakukan wawancara langsung kepada narasumber atau informan untuk memperoleh informasi mengenai masalah yang ingin diselidiki. Peneliti juga akan menggunakan studi dokumen dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian melakukan proses wawancara kepada narasumber, sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu membuat janji kepada narasumber melalui media komunikasi yaitu whatsapp. Dilakukannya penentuan jadwal terhadap narasumber dikarenakan narasumber memiliki aktivitas lainnya. Namun pada penelitian ini peneliti mengalami kendala karena narasumber yang ingin diwawancara seperti pak lurah sulit dihubungi karena tidak menggunakan media sosial whatsapp, dan peneliti sulit untuk menemui karena pak lurah sering tidak ada di kantor kalurahan, maupun sakit pada saat peneliti ingin melakukan wawancara. Pada instrumen penelitian, tidak semuanya informan menjawab pertanyaan yang ada dikarenakan narasumber berbicara sesuai alur yang mereka ketahui.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan peristiwa masa lalu, dan studi dokumentasi melengkapinya penggunaan pendekatan observasi dan wawancara, menurut (Sugiyono 2016: 329). Selain itu, dokumentasi dapat digunakan sebagai pengumpulan data, di mana dokumen

diperiksa untuk mendapatkan data atau informasi tentang masalah yang diselidiki. Dokumentasi dilakukan dengan membuat catatan tentang hal-hal yang sudah terjadi. Dokumentasi dapat berupa foto bersama informan, foto aset desa, foto lingkungan sekitar desa, dan foto tempat yang mungkin menjadi potensi. Penulis juga menambahkan informasi seperti catatan suara dan rekaman dari informan.

Untuk menguji sesuatu yang benar-benar terjadi, bukti harus ada, baik dalam bentuk tulisan maupun film. Karena sifatnya yang alami dan sesuai dengan konteks penelitian, catatan dan dokumen berguna dan cocok untuk penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan kemudian memeriksanya. Penulis melakukan ini dengan melihat dan mengambil data dan dokumen dari dokumen yang ada, baik itu tertulis, gambar, atau elektronik, seperti arsip dokumen atau bahan referensi, foto, dan informasi dari situs web.

Dalam penelitian ini peneliti meminta dokumentasi kepada narasumber yang telah diwawancara sebagai kebenaran bahwa peneliti telah mewawancara, juga dalam proses mewawancara peneliti menggunakan rekaman melalui ponsel. Juga peneliti meminta dokumen profil Kalurahan Kedungpoh, RPJMKal, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti juga menggunakan informasi dari situs web sebagai bahan referensi.

d. Triangulasi

Untuk memastikan kepastian dan kualitas datan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Model penelitian triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini merekomendasikan bahwa peneliti menggunakan berbagai sumber

data untuk mendapatkan data. Ini berarti bahwa data yang sama atau sejenis yang diambil dari berbagai sumber data akan lebih benar.

Penelitian ini menggunakan triangulasi, yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Setelah data dikumpulkan secara menyeluruh, mereka divalidasi dari berbagai sumber sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk penarikan kesimpulan. Dengan teknik ini, diharapkan data yang dikumpulkan memenuhi konstrukt penarikan kesimpulan. Karena kombinasi triangulasi ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan di lokasi penelitian, peneliti dapat melakukan pencatatan data secara menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan bahwa data yang dikumpulkan layak untuk digunakan.

4. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2013) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini mencakup mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang harus dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga data menjadi mudah dipahami baik oleh individu maupun orang lain. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan dari studi dokumentasi atau hasil wawancara akan dianalisis dan ditafsirkan untuk menentukan maknanya. Setelah itu, data tersebut akan dihubungkan dengan masalah penelitian. Narasi dan kutipan langsung dari wawancara digunakan untuk menyampaikan data yang terkumpul.

Proses analisis yang dilakukan oleh peneliti saat melakukan observasi, wawancara, dokumentasi terhadap narasumber memperoleh banyak data yang dihasilkan, dan pada penelitian ini narasumber juga banyak menjawab instrumen pertanyaan dari peneliti sehingga data yang diperoleh cukup valid untuk dianalisis sehingga menghasilkan temuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran sistematis, akurat, dan faktual tentang informasi yang akan diteliti; oleh karena itu, analisis eksploratif digunakan sebagai teknik analisis data. Setelah semua data diperoleh dan diselesaikan, analisis dilakukan. Data kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif oleh Miles dan Huberman, yang termasuk:

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, atau kombinasi dari ketiganya (Triangulasi). Pengumpulan data dapat memakan waktu berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan buat menerima info yang komprehensif. Di termin awal, peneliti menghasilkan gambaran awal dalam situasi sosial atau subjek yang diteliti, menggunakan mencatat segala hal yang diamati serta didengar.

b. Reduksi data

Reduksi data berfokus pada pernyataan tentang penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang berasal dari catatan tertulis di lapangan. Oleh karena itu, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil pengamatan mengenai model tatakelola kalurahan serta implementasi tatakelola kalurahan yang ada di kalurahan Kedungpoh. Selain itu, ini akan mempermudah penelitian untuk mengumpulkan ulang data dan mencarinya jika diperlukan. Untuk mencapai kesimpulan akhir, reduksi data juga merupakan jenis analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang elemen yang tidak perlu.

c. Penyajian Data

Informasi yang telah dilaporkan secara tertulis disebut penyajian data. Penyajian data pasca penelitian ini mengaitkan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian kerangka teori. Hasil observasi dan wawancara yang dihasilkan setelah pengumpulan data diuraikan dalam penyajian ini. Triangulasi juga mencakup Generalisasi dan Kesimpulan untuk mendapatkan kesimpulan dari data yang diteliti.

d. Penarik Kesimpulan

Ini adalah akhir dari suatu penelitian. Untuk mencapai kesimpulan, peneliti mengaitkan temuan penelitian dengan konsep yang ada dan memberikan maknanya. Peneliti menggunakan data yang diperoleh dari dokumentasi dan wawancara untuk melakukan analisis data. Hal ini akan mempermudah peneliti untuk melakukan analisis dengan data tersebut.

BAB II

PROFIL KALURAHAN KEDUNGPOH

A. Sejarah Kalurahan

Orang dahulu sering menggunakan kedung untuk mandi, mencuci, dan memenuhi kebutuhan ternak mereka, dan namanya diambil dari kata "Kedung dan Poh" karena ada kedung yang luas dengan banyak ikan di sebelah baratnya dan ada pohon besar di sebelah baratnya yang membuat suasannya nyaman dan teduh. Setelah itu, tempat tersebut disebut "Kedungpoh". Wilayah Kedungpoh adalah bagian dari Kademangan Kedungkeris sebelum terbentuknya Pemerintah Kalurahan. Pada saat itu, ada dua bekel. Bekel Wongsodikromo memerintah wilayah barat Kedungpoh dan Bekel Dersoijoyo memerintah wilayah timur. Bekel Wongso semito adalah bekel terakhir yang berkuasa di Kedungpoh Kidul. Mulai tahun 1911, terjadi perubahan dalam pemerintahan. Posisi Kademangan diubah menjadi Kapanewon yang dipimpin oleh Ndoro Siten, yang setara dengan Camat saat itu. Pada tanggal 27 Januari 1911, Kartorejo, lurah pertama di Kalurahan Kedungpoh, diangkat sebagai pejabat resmi oleh Bupati Gunungkidul. Oleh karena itu, hari itu adalah hari jadi Kalurahan Kedungpoh. Padmodiwiryo adalah lurah kedua Kalurahan Kedungpoh dari tahun 1911 hingga 1945. Pada masa pemerintahan Lurah Padmodiwiryo, wilayah Kedungpoh dibagi menjadi sepuluh padukuhan, yang masih ada hingga saat ini.

Berikut nama Lurah Kalurahan Kedungpoh :

- | | | |
|----|--------------|-------------------|
| 1. | Kartorejo | Tahun 1911 – 1945 |
| 2. | Padmodiwiryo | Tahun 1946 – 1990 |
| 3. | Kartiyo | Tahun 1991 – 1998 |
| 4. | Suratmiyati | Tahun 1999 – 2007 |

5.	Edi susilo	Tahun 2007 – 2013
6.	Mugiharto	Tahun 2013 – 2019
7.	Dwiyono	Tahun 2019 – Sekarang

B. Visi dan Misi

1. Visi Kalurahan Kedungpoh

Visi dari Kalurahan Kedungpoh yaitu: “Menjadi Kedungpoh Lebih Baik, Cerdas, Mandiri, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia” yang memiliki makna yang luas dan mampu menjadi pedoman bagi Kalurahan dalam menentukan visi, misi, dan arah pembangunan Kalurahan Kedungpoh

Untuk “Menjadi Kedungpoh Lebih Baik, Cerdas, Mandiri, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia” merupakan tekad masyarakat Kalurahan Kedungpoh yang senantiasa ingin mewujudkan semboyan agar Kalurahan Kedungpoh menjadi Kalurahan yang mampu mencapai cita-cita dan harapan seluruh masyarakat Kalurahan Kedungpoh, dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan dan kemandirian, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang berkelanjutan berdasarkan nilai Sosial dan budaya.

2. Misi Kalurahan Kedungpoh

Misi pembangunan Kalurahan adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan, untuk mencapai visi pembangunan Kalurahan yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan Kalurahan, sesuai dan selaras dengan substansinya, maka dirumuskan misi pembangunan Kalurahan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang jujur dan berakhhlak mulia;
- b. Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Kalurahan;
- c. Meningkatkan Perekonomian Kalurahan Melalui Pengembangan Potensi Lokal;
- d. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Sarana Prasarana Umum;
- e. Meningkatkan Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Alam, dan Penyakit Menular.

C. Kondisi Geografis

Kalurahan Kedungpoh merupakan salah satu Kalurahan di Kapanewon, Nglipar Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki luas 1.079,9830 hektar. Secara geografis Kalurahan Kedungpoh berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kalurahan Mertelu, kecamatan Gedangsari
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kalurahan Bejiharjo, Karangmojo
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kalurahan Nglipar
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Kalurahan Pengkol

Secara geografis Kalurahan Kedungpoh berada pada ketinggian 200 m s/d 500 m diatas permukaan laut dengan curah hujan rata – rata 700 mb/tahun. Sedang jarak Kalurahan Kedungpoh dari orbitasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Jarak dari Ibukota Kecamatan : 3 km
2. Jarak dari Ibukota Kabupaten : 12 km
3. Jarak dari Ibukota Provinsi : 45 km
4. Jarak dari Ibukota Negara : 884 km

D. Kondisi Demografi

Demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.

Table 2. 1 Data Penduduk Per Padukuhan

No	Nama Padukuhan	Jumlah Kartu Keluarga	Jumlah Penduduk	
			Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Kedungpoh Kidul	117	376	5,96%
2	Kedungpoh Kulon	198	595	9,43%
3	Kedungpoh Lor	193	653	10,35%
4	Kedungpoh Tengah	203	626	9,92%
5	Sinom	235	758	12,01%
6	Gentungan	276	806	12,77%
7	Mojosari	181	522	8,27%
8	Nglorog	164	446	7,07%
9	Gojo	283	851	13,48%
10	Klayar	220	678	10,74%
Jumlah		2.070	6.311	100,00%

(Sumber RPJMKal Kedungpoh 2020-2025)

Kependudukan Kalurahan Kedungpoh berdasarkan table diatas terdiri dari 10 Padukuhan yang terdapat 2.070 Kartu Keluarga (KK) dengan total jumlah penduduk yang ada sebanyak 6.311 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak ada di padukuhan sinom dengan jumlah 806 jiwa dengan persentase 12,77%. Dan yang paling sedikit ada di Padukuhan Kedungpoh Kidul dengan jumlah 376 jiwa dan persentase 5,96%. Penduduk Kalurahan Kedungpoh merupakan mayoritas penduduk asli setempat namun, terdapat juga beberapa masyarakat

pendatang yang biasanya ikut suami yang merupakan penduduk asli. Banyak juga masyarakat asli yang merantau keluar daerah lain untuk mendapatkan pekerjaan lainnya.

Table 2. 2 Data Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia (Tahun)	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	0-9	728	13,43%
2	10-19	921	16,99%
3	20-29	831	15,33%
5	40-49	893	16,47%
6	50-59	753	13,89%
7	60-69	586	10,81%
8	70-79	447	8,24%
9	80-89	219	4,04%
10	90-100	44	0,81%
Jumlah		6.306	100,00%

(Sumber RPJMKal 2020-2025)

Dari table diatas maka peneliti melihat bahwa berdasarkan usia penduduk terbanyak ada di usia 10-19 tahun dengan jumlah keseluruhan 921 dengan persentase 16,99%. Juga masih terdapat masyarakat yang berumur 90-100 tahun yang jumlah total ada 44 dengan persentase 0,81%, membuktikan bahwa masyarakat Kedungpoh berumur panjang. Jika dilihat dari keseluruhan antara usia 20-59 yang terdapat pada table diatas maka dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya masyarakat yang berusia produktif untuk bekerja dan juga mengembangkan potensi sehingga memiliki kemampuan untuk meningkatkan produktivitas pendapatan kalurahan dalam mengolah potensi yang ada.

Table 2. 3 Pendidikan Penduduk Kedungpoh

No	Kelompok	Jumlah (Jiwa)
1	TK dan Kelompok	734
2	Sekolah Dasar/Sederajat	1.553
3	SMP/Sederajat	1.229
4	SMA/Sederajat	1.233
5	Akademik/D1-D3	67
6	Starata-1	110
7	Tidak Bersekolah	1.450
Total		6.376

(Sumber RPJMKal 2020-2025)

Berdasarkan data pada table diatas maka dapat disimpulkan tingkat Pendidikan di Kalurahan Kedungpoh tidak cukup baik karena yang tidak bersekolah sebanyak 1.450. jika dilihat tamatan SMA/Sederajat berada posisi ketiga sebanyak 1.233 membuktikan bahwa untuk pendidikan sudah lumayan cukup membaik Namun berdasarkan pengamatan peneliti ketika observasi dilapangan memang sudah cukup baik dengan banyaknya tamatan SLTA tapi hal ini menjadi masalah baru yakni kurangnya minat para anak muda untuk melanjutkan pendidikan ke Strata I mereka cenderung lebih memilih untuk bekerja langsung merantau keluar daerah. Hal inilah yang menjadi PR baru menumbuhkan keinginan anak muda untuk kuliah.

Dalam dunia pendidikan ini menjadi masalah yang sangat perlu diperhatikan, karena tingkat pendidikan yang ada di kalurahan menjadi dasar dan juga potensi dalam memajukan kalurahan yang ada di Kedungpoh. Tentunya jika Sumber Daya Manusia yang dimiliki berkualitas maka bisa merubah pola pikir dan juga dapat mengembangkan potensi kalurahan yang dimiliki.

Table 2. 4 Pekerjaan dan mata pencaharian masyarakat Kedungpoh

No	Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1	Karyawan	31
2	TNI/Polri	4
3	Swasta	313
4	Wiraswasta/Pedagang	1.204
5	Petani	1.284
6	Tukang	60
7	Buruh Tani	14
8	Pensiunan	46
9	Jasa	29
Jumlah		2.985

(Sumber RPJMKal 2020-2025)

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pekerjaan dan mata pencaharian masyarakat Kedungpoh adalah petani dan pedagang/wiraswata. Saat melakukan observasi, peneliti menemukan bahwa kebanyakan orang di Kalurahan Kedungpoh adalah petani. Ini terlihat dari banyaknya orang yang pergi ke sawah di pagi hari dan pulang sekitar sore atau petang.

Table 2. 5 Data Penduduk berdasarkan Agama

No	Agama	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Islam	3.114	3.180	6.294
2	Kristen	6	7	13
3	Katholik	3	1	4
4	Hindu	0	0	0
5	Budha	0	0	0
6	Konghucu	0	0	0
Jumlah		3.123	3.188	6.311

(Sumber RPJMKal 2020-2025)

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Kalurahan Kedungpoh menganut agama islam, dan sisanya adalah Kristen dan katholik. Pada observasi sebelumnya terdapat banyak sekali masjid. Namun tidak dengan Kristen dan katholik

E. Kondisi Perekonomian Kalurahan Kedungpoh

Hasil identifikasi sumber daya alam Kalurahan Kedungpoh Kecamatan Nglipar dapat dilihat dari kondisi alamnya. Sumber daya alam ini merupakan salah satu potensi pembangunan di kalurahan.

Table 2. 6 Sumber Daya Alam Kalurahan Kedungpoh

No	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Jumlah
1	Material Batu Kali dan Kerikil	M ³	-
2	Pasir Urug	M ³	50
3	Lahan Tegalan	Ha	200
4	Lahan Hutan	Ha	250
5	Sungai	Km	40

(Sumber RPJMKal 2020-2025)

Table 2. 7 Penggunaan Lahan Kalurahan Kedungpoh

No	Penggunaan Lahan	Jumlah (Ha)
1	Lahan Sawah:	
	Irigasi Teknis	70
	Tadah Hujan	80
2	Lahan Bukan Sawah:	
	Pekarangan/Bangunan	479
	Tegal/Kebun	200
	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	250

(Sumber RPJMKal 2020-2025)

Table 2. 8 Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi Per Tahun	
		Satuan	Jumlah
1	Tanaman Pangan	Ton/Tahun	-
2	Buah-Buahan	Ton/Tahun	
	Rambutan		100
3	Perkebunan	Ton/Tahun	-
4	Peternakan	Ekor	
	Sapi		800
	Kambing		2.400
	Ayam		600.000
5	Perikanan	Ton/Tahun	-

(Sumber RPJMKal 2020-2025)

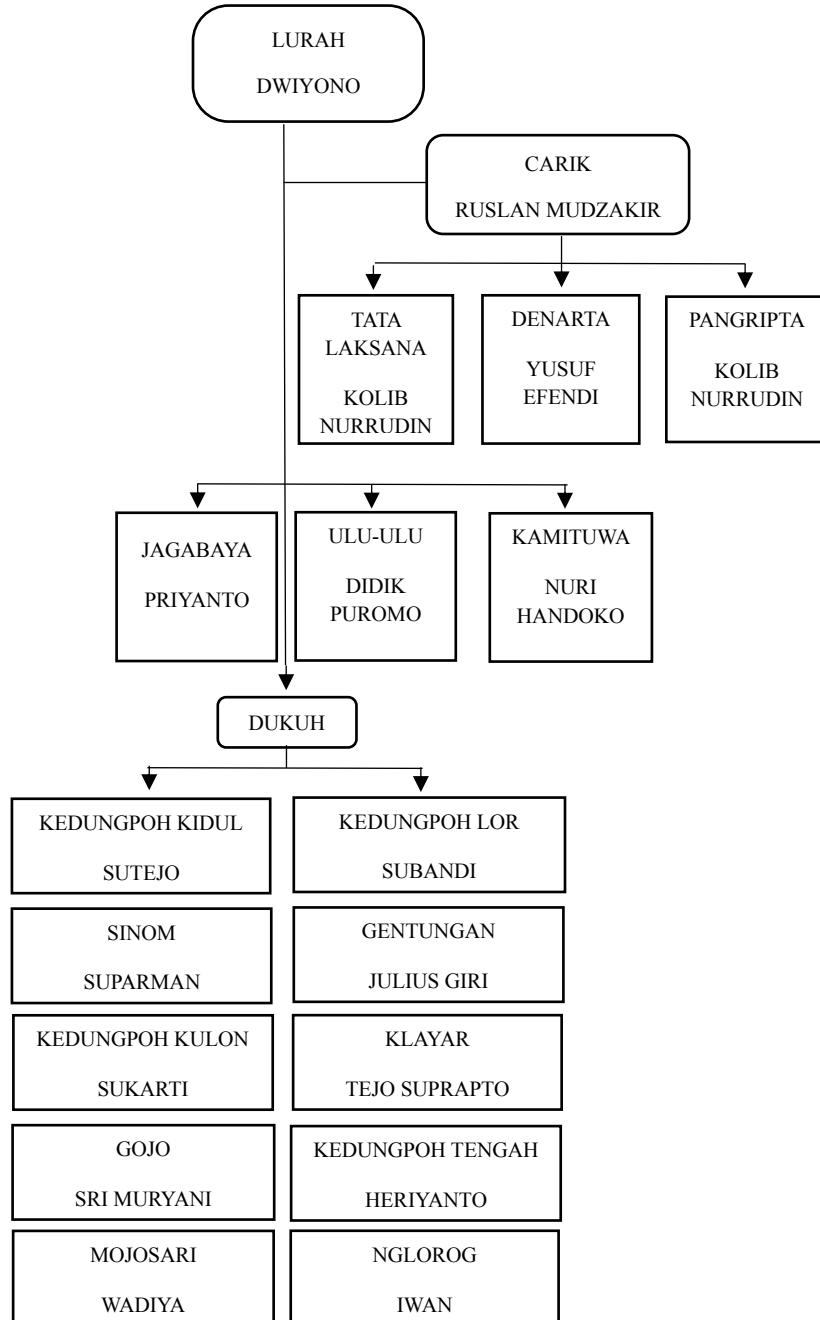
Potensi bidang ekonomi Kalurahan Kedungpoh meliputi beberapa sector. Sektor Pertanian menjadi tujuan utama masyarakat Kalurahan Kedungpoh. Hasil utama pertanian adalah padi, ketela, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan holtikultura. Sektor perkebunan yang ada meliputi pisang, mangga, kelapa, sawo, nangka, rambutan, durian, klengkeng, srikaya, kakau, jambu kristal. Sektor kehutanan berupa kayu jati, mahoni, sono, sengon, munggur, akasia, bambu, lebah madu. Sektor peternakan meliputi sapi, kambing, ayam, itik. Sektor perikanan berupa pengembangan lele, nila, dan ikan air tawar lain. Sektor home industry juga terdapat di Kalurahan Kedungpoh sehingga mampu menopang kebutuhan ekonomi masyarakat. Sektor pariwisata berbasis budaya.

F. Kondisi Pemerintahan Kalurahan Kedungpoh

Pemerintahan Kalurahan Kedungpoh adalah pusat pemerintahan Kecamatan Nglipar, dengan dua kantor dan satu balai kelurahan. Aparat Kalurahan Kedungpoh saat ini berupaya memberikan layanan terbaik kepada

masyarakatnya. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh membentuk dasar hukum untuk pembentukan pamong Kalurahan Kedungpoh. Tabel pamong Kalurahan Kedungpoh adalah sebagai berikut:

Bagan 2. 1 Struktur Pemerintahan Kalurahan Kedungpoh



Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 menetapkan bahwa kalurahan adalah sebutan untuk desa di wilayah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Pemerintahan Kalurahan.

G. Kondisi Sarana dan Prasarana Kalurahan

Saat ini, Kalurahan Kedungpoh memiliki sarana dan prasarana untuk pendidikan PAUD, TK, SD, SLTP, dan SLTA. Untuk kesehatan, ada 1 Puskesmas Pembantu. Potensi pembangunan kelurahan Kedungpoh termasuk sumber daya pembangunan yang tersedia.

Table 2. 9 Prasarana Umum

No	Prasarana Umum	Jumlah	Satuan
1	Jalan Provinsi	3,5	Km
2	Jalan Kabupaten	9	Km
3	Jalan Lingkungan	50	Km
4	Jembatan	53	Buah

(Sumber: RPJMKal 2020-2025)

Sarana prasarana umum yang dimiliki adalah jalan provinsi dengan panjang 3,5 km, kabupaten dengan panjang 9 km, dan jalan lingkungan 50 km. Serta memiliki 53 buah jembatan

Table 2. 10 Prasarana Kesehatan

No	Prasarana Kesehatan	Jumlah (Unit)
1	Puskesmas	1
2	Posyandu	10
3	MCK	4
4	Sarana Air Bersih	4

(Sumber RPJMKal 2020-2025)

Table 2. 11 Prasarana Pendidikan

No	Prasarana Pendidikan	Jumlah (Unit)
1	Perpustakaan Kalurahan	1
2	Gedung Sekolah PAUD	9
3	Gedung Sekolah TK	7
4	Taman Pendidikan Al Qur'an	20
5	Gedung SD/Sederajat	5
6	Gedung Sekolah SMP/Sederajat	3
7	Gedung Sekolah SMA/Sederajat	1

(Sumber: RPJMKal 2020-2025)

Table 2. 12 Prasarana Ekonomi

No	Prasarana Ekonomi	Jumlah (Unit)
1	Pasar Kalurahan	1
2	Kios Kalurahan	2

(Sumber: RPJMKal 2020-2025)

Table 2. 13 Prasarana Umum

No	Prasarana Umum	Jumlah (Unit)
1	Olahraga	6
2	Kesenian/budaya	6
3	Balai Pertemuan	11
4	Sumur Kalurahan	1
5	Pasar Kalurahan	1

(Sumber RPJMKal 2020-2025)

H. Potensi dan Daya Tarik Kalurahan

1. Kedungpoh Park

Salah satu tempat wisata alam di Kalurahan Kedungpoh, Kedungpoh Park terletak di padukuhan Kedungpoh Lor dan menawarkan pemandangan indah dari gunung sewu dan barisan bukit-bukitnya. Waktu terbaik untuk mengunjungi Kedungpoh Park adalah saat matahari terbenam dan terbit. Selain itu, ada kolam renang untuk anak-anak, yang menjadikannya tempat yang ideal untuk rekreasi keluarga. Terdapat juga berbagai restoran yang menjual berbagai jenis makanan, mulai dari minuman hingga makanan berat, serta cemilan atau snack. Selain itu, Kedungpoh Park sering digunakan untuk acara seperti lomba 17 Agustus dan pentas seni karena memiliki panggung dan tempat yang cukup luas serta fasilitas yang mendukung, seperti parkiran yang luas, akses jalan yang mudah, kamar mandi bersih, dan banyak tempat cuci tangan,

Gambar 2. 1 Kedungpoh Park



(Sumber:<https://Gunungkidul.sorot.co/berita107540pemerintah-dukung-geliat-ekonomi-lewat-kedungpoh-hill-view.html>)

2. Desa Wisata Klayar

Klayar merupakan sebuah dusun yang terletak di Desa Kedungpoh yang berada di bawah pengelolaan Kelompok Sadar Wisata Kedungpoh. Memiliki bentang alam perbukitan alami yang menyuguhkan pemandangan menakjubkan, antara lain hutan kayu putih dan aliran Sungai Oya yang melewati dusun Klayar. Sorotan lainnya adalah Bendungan Kedung Lembu. Bendungan ini merupakan daya tarik utama yang menampilkan danau buatan besar yang dialiri oleh mata air yang sengaja dibendung. Pengunjung di sini dapat menikmati aktivitas air seperti perahu dayung dan naik perahu, menjelajahi tempat berfoto, dan menjelajah Sungai Oya untuk melihat taman bunga yang indah di sepanjang tepiannya. Selain itu, terdapat taman batu dengan bebatuan tersusun mengelilingi taman bunga.

Gambar 2. 2 Desa wisata Klayar



(Sumber:<https://visitingjogja.jogjaprov.go.id/26333/desa-wisata-klayar-kedungpoh-sebuah-sudut-keindahan-di-tepi-sungai-oya/>)

3. Lumbung Mataraman Kedungpoh

Lumbung Mataraman merupakan destinasi wisata yang dikelola oleh Kelompok Wanita Tani yang dibudidayakan berbagai buah-buahan dan sayur-

sayuran. Merupakan objek wisata baru yang diresmikan pada pertengahan tahun 2023 oleh Sri Sultan Hamengkubowono X. Yang menarik pengunjung ke sini adalah kesempatan menyaksikan langsung proses bertani mulai dari menanam hingga memanen yang dilakukan oleh petani setempat. Selain itu, terdapat gazebo di sekitar lumbung tempat pengunjung dapat duduk, membeli makanan, dan minuman. Awalnya bertujuan untuk mempromosikan swasembada pangan dengan mendorong masyarakat lokal untuk menanam dan mengonsumsi produk mereka sendiri,. Selain wisatawan umum, Lumbung Mataraman juga sering dikunjungi oleh studi wisata pemerintah dari daerah lain, sehingga menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk mencari ide-ide kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2. 3 Lumbung Mataraman Kedungpoh



(Sumber:<https://Gunungkidul.sorot.co/berita-108022-lumbung-mataraman-kedungpoh-siap-diresmikan-bulan-depan.html>)

BAB III

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Pendahuluan

Pada bab sebelumnya peneliti telah menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian, metode penelitian hingga kondisi umum di kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melewati beberapa rangkaian proses penelitian dan pengumpulan data. Yang kemudian tahap selanjutnya adalah menganalisis data yang sudah didapatkan hingga menyederhanakan daya yang diperoleh dilapangan kedalam bentuk yang paling mudah untuk dibaca dan dipahami semua pihak.

Pada umumnya analisis data merupakan hasil dari penelitian yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang sudah diajukan oleh peneliti kepada para informan untuk menggali terkait suatu kejadian dan disajikan dalam bentuk analisis data yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. analisis data bertujuan untuk menyimpulkan serta menyederhanakan data yang sudah diperoleh agar menjadi data yang padat guna mendapatkan sebuah gambaran atau pemahaman mengenai Model Tatakelola Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Analisis dan Pembahasan

1. Model Tatakelola Pemerintahan Kalurahan Kedungpoh

Governance yang dimaksud adalah tentang tatakelola pemerintahan. Tatakelola pemerintahan kalurahan merupakan sistem yang melibatkan berbagai aspek pengelolaan dan pengaturan administrasi di tingkat pemerintahan lokal yang paling mendasar, yaitu tingkat kalurahan atau desa. Sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan suatu negara, kelurahan atau

desa memegang peranan penting dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pembangunan, dan menjaga kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam konteks ini, tatakelola pemerintahan kalurahan mencakup sejumlah prinsip, struktur, dan proses yang mengatur bagaimana pemerintah lokal tersebut beroperasi.

Dalam *Governance* atau yang dimaksud adalah tatakelola, terdapat sebuah tatakelola pemerintahan yang baik atau biasanya disebut *Good Governance*. *Good Governance* didefinisikan sebagai konsep penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ini melibatkan upaya kolektif dalam kerangka kebijakan negara untuk mengelola berbagai sumber daya menuju pembangunan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan secara efektif dan efisien. Melalui pembuatan kebijakan yang sah, tujuan utamanya adalah mencapai kesejahteraan rakyat dan mengelola pemerintahan dengan baik yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan efisiensi pasar, serta melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan akuntabel terhadap publik secara profesional, transparan, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsipnya.

Terdapat 9 indikator dalam perwujudan *Good Governance*, yaitu: Partisipasi (Participation), Penegakan hukum (Rule Of Law), Transparansi (*Transparency*), Responsif (*Responsiveness*), Konsensus (*Consensus Orientation*), Kesetaraan dan keadilan (*Equity*), Efektifitas dan efisien, Akuntabilitas dan Visi Strategi (*Strategic Vision*). Menurut Sedarmayanti (2014:5) indikator Good Government Governance adalah : Partisipasi (*participation*), Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Efektivitas (*effectiveness*), Penegakan Hukum (*law enforcement*)

Berdasarkan indikator *Good Goverment Governance* maka peneliti mewawancarai Ruslan Mudzakir selaku Carik, Ruslan Mudzakir menyampaikan bahwa:

“Keberhasilan sesuatu yang ingin digapai perlu melakukan sebuah perencanaan. Pemerintah kalurahan sudah mencoba setiap tahunnya

agar peningkatan terjadi, meskipun masih banyak kekurangan. Untuk perencanaan semuanya dibawa di Muskal, meskipun dari awal sudah ada di RPJMKal, sehingga bisa diprioritaskan kata kunci dari sebuah keberhasilan adanya keterlibatan masyarakat tapi tidak hanya sebagai keterlibatan saja sebagai peserta.” (wawancara pada 5 Maret 2024)

Sama halnya yang disampaikan oleh owen rosy selaku masyarakat dan penjaga lapak di kedungpoh park, owen rosy menyampaikan bahwa:

“kalau dari pihak lapak disini sering melaporkan ke pihak pengelola untuk fasilitas-fasilitas yang rusak maupun kekurangan lainnya, seperti waktu itu kami meminta tambahan meja, juga melaporkan pintu toilet yang sudah tidak layak. Kalau tanggapan pemerintahan kalurahan maupun dari pihak pengelola BUMKal katanya itu segera diperbaiki.” (wawancara pada 19 Maret 2024)

Dari kutipan wawancara yang disampaikan oleh pak Ruslan Mudzakir dan mas Owen Rosy diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses tatakelola yang terjadi di Kalurahan Kedungpoh terdapat salah satu pilar utama yaitu adanya partisipasi dari keterlibatan masyarakat dimana pemerintahan kalurahan membentuk sebuah perencanaan yang semuanya perencanaan tersebut dibawa didalam MusKal yang artinya bahwa masyarakat sudah terlibat dan ikut serta secara aktif dalam kegiatan dengan menyampaikan pendapat. Juga partisipasi masyarakat dapat dilihat dari masyarakat yang memberikan aspirasi kepada Pemerintahan Kalurahan agar memberikan tambahan meja dan juga perbaikan toilet dalam pengelolaan BUMKal meskipun tanggapan Pemerintahan Kalurahan mengatakan bahwa sebentar lagi, berarti juga terlihat bahwa pemerintah sudah responsive karena sudah merespon kebutuhan, keinginan dan aspirasi masyarakat meskipun tidak secara cepat, setidaknya terlihat ada.

Terkait dalam keterbukaan dan kejelasan dalam tindakan dan keputusan Pemerintah Kalurahan Kedungpoh serta mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dengan memungkinkan pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kinerja pemerintah kalurahan sehingga masyarakat Kalurahan Kedungpoh memiliki akses informasi agar lebih mudah mengawasi serta jika terjadi kesalahan maka masyarakat bisa menuntut

pertanggungjawaban. Maka peneliti mewawancara Ruslan Mudzakir selaku Carik, Ruslan Muzdahir mengatakan bahwa:

“Transparansi kita sebenarnya semua tidak ada yang ditutupi, semua bisa diakses seperti APBKal secara ringkas di baliho, APBKal yang pdf diupload juga, laporan laporan kepada Masyarakat juga ada. Terkait dengan kurangnya transparansi yang dikatakan Masyarakat, Masyarakat kurang peduli terkait tersebut. tahun ini semua kegiatan selesai dokumen semua harus selesai sesuai dengan prosedur yang ada. Dimana semua dicek sesuai dengan standar sehingga dijadikan dokumen dan dipertanggungjawabkan” (wawancara pada 5 Maret 2024)

Sama halnya dengan pernyataan dari masyarakat yaitu Basuki, Basuki menyatakan bahwa:

“kalau semacam dana apbkal itu yang digunakan sudah ada dibaliho diatas sana dekat kedungpoh park, tetapi itu kita agak kesulitan melihat karena ditancepinnya ditempat yang tidak pas untuk dilihat karena kalau pas kita mau turun itu tidak mungkin sambil lihat kesitu juga sebaliknya. Kalo untuk laporan juga biasanya ada di Masyarakat. Biasanya disampaikan melalui pak dukuh terus disampaikan ke Masyarakat.” (wawancara pada 19 Maret 2024)

Gambar 3. 1 Uploadan APBKal



(Sumber: Website Kalurahan Kedungpoh)

Dari kutipan wawancara yang disampaikan oleh Ruslan Mudzakir selaku carik dan Basuki selaku masyarakat dapat disimpulkan bahwa informasi berbagai proses maupun kegiatan dapat diakses secara bebas dan dapat dilihat oleh masyarakat asli Kalurahan Kedungpoh maupun masyarakat luar Kedungpoh, informasi inipun mudah dimengerti sehingga masyarakat bisa memonitoring dan mengevaluasi jika terjadi penyimpangan. Dalam hal ini juga dibuktikan dengan adanya pertanggungjawaban dari semua kegiatan Pemerintahan Kalurahan Kedungpoh secara transparan yang bisa diakses di website Kalurahan Kedungpoh kepada publik, maupun secara ringkas melalui baliho yang ditancapkan di daerah dekat dengan akses jalan utama masyarakat. Meskipun akses penancapan yang kurang tepat karena jalan pada akses utama itu turunan dan juga tanjakan.

Pemerintah yang baik harus efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga berdampak terhadap masyarakat dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Maka dari itu untuk mengetahui terkait efektifitas dan efisiensi dalam pengoptimalan sumber daya. Dimana sumber daya yang dimiliki pemerintahan Kalurahan yang dikelola Bersama BUMKal untuk itu maka peneliti mewawancarai Yusuf Efendi selaku Kaur Denarta dan juga sebagai Pengawas BUMKal, Yusuf Efendi menyampaikan bahwa:

“pada usaha ini sendiri BUMKal mengelola unit usaha persewaan, perdagangan, pariwisata. untuk sementara ini yang berjalan hanya pariwisata dan juga pasar desa pada perdagangan, untuk tahun ini pada tahun 2023 pasar desa diserahkan kepada BUMKal. dalam hal perdagangan atau pasar desa ini masyarakat diberikan fasilitator yaitu lapak guna masyarakat bisa mengembangkan perekonomian yang ada, sama halnya juga dalam bidang pariwisata yaitu kedungpoh park, dimana itu adalah kios-kios, juga kemarin itu kita ada pom mini yang ada di depan kalurahan ini namun vakum.” (wawancara pada 27 Maret 2024)

Sama halnya dengan pernyataan yang disampaikan oleh Aries widyawati selaku masyarakat dan juga anggota BUMKal bahwa :

“untuk sekarang yang dipegang BUMKal itu ada pasar dan taman desa 2 itu untuk sementara untuk pasar kita tentang parkir, parkir itu diurus BUMKal dan untuk taman desa operasionalnya dan peralatannya diserahkan ke BUMKal dan untuk tahun sebelum-sebelumnya dari PEMKal itu ada dana untuk BUMKal lalu dibuat pom mini” (wawancara pada 27 Maret 2024)

Sama halnya dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sugiyanto, Sugiyanto mengatakan bahwa:

“untuk penyewaan kepada masyarakat itu di kedungpoh park itu masih bisa terjangkau, sama hal juga untuk penyewaan pasar desa di gojo juga terjangkau. Yang boleh sewa disitu masyarakat penduduk kedungpoh, dan tidak ada dari luar kedungpoh.” (wawancara pada 27 Maret 2024)

Pernyataan lain yang disampaikan oleh Owen Rosy selaku masyarakat, Owen Rosy mengatakan bahwa:

“pom mini dulu itu berada tepat didepan kalurahan namun sudah tidak ada lagi karena rungkad, kalau untuk pasar desa masih ada, yang digojo itu” (wawancara pada 19 Maret 2024)

Gambar 3. 2 Kedungpoh Park dan Pasar Desa



(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Dari kutipan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Yusuf Efendi, Aries Widyawati, Sugiyanto, dan Owen Rosy maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses tatakelola pemerintahan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dengan memberikan dana untuk mengelola sudah terjadi dan terlaksana, di

dalam bidang pariwisata dan dibidang perdagangan yaitu pengelolaan pasar dan pom mini. Semuanya tidak berjalan efektif karena dalam pengelolaan pom mini pemerintah sudah memberikan dana lalu mengalami kegagalan, tetapi dalam sektor pariwisata yaitu kedungpoh park, Pemerintah Kalurahan Kedungpoh sudah berhasil mencapai hasil yang diinginkan karena tujuan dibuatnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat asli kedungpoh dengan tidak memberikan ruang kepada masyarakat yang bukan asli kedungpoh karena yang mengelola kios di Kedungpoh Park adalah masyarakat asli Kedungpoh. Dan juga untuk penyewaan kios kepada masyarakat cukup terjangkau karena masyarakat menjangkau akan biaya penyewaan kios di kedungpoh park maupun di pasar desa.

Dengan melihat tatakelola pemerintahan yang ada di Kalurahan Kedungpoh yang berdasarkan indikator terciptanya tatakelola yang baik, tentunya Pemerintah Kalurahan Kedungpoh menghasilkan sebuah model *governance*. Dalam tatakelola pemerintahan, Jhon Gerring dan Strorm C. Thacker menyatakan bahwa terdapat empat model *governance*, yakni: (1) model *anarki*, sebuah konteks dimana otoritas pemerintah memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan, Tingkat demokrasi yang rendah, dan sering kali diwarnai oleh konflik, (2) model *sentralistik*, sebuah situasi dimana Keputusan diambil secara terpusat dengan tingkat demokrasi yang rendah, (3) model *desentralistik*, kekuasaan politik yang rendah, namun tingkat demokrasi tinggi, (4), model *sentripetal*, kekuasaan politik yang kuat dalam pengambilan Keputusan, dengan tingkat demokrasi yang sangat tinggi (Gerring & Thacker, 2008).

Berdasarkan empat model *governance* dan dilihat dari tatakelola Pemerintahan Kalurahan Kedungpoh maka dapat dirumuskan bahwa Pemerintah Kalurahan Kedungpoh menganut model *governance* yaitu desentralistik dimana tingkat kekuasaan politik yang rendah, namun tingkat demokrasi tinggi atau dalam tatakelola pemerintahan kalurahan sudah ditangani

berdasarkan bidang. Dikatakan desentralistik karena dalam tatakelola pemerintahan kalurahan kedungpoh perencanaan dari masyarakat di salurkan semuanya melalui MusKal serta pemerintahan kalurahan memberikan dana kepada BUMKal untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh kalurahan kedungpoh dengan tujuan pengelolaan semuanya adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

2. Implementasi Model Tatakelola Pemerintahan Kalurahan Kedungpoh

Dalam tatakelola pemerintahan kalurahan tentunya ada kendala atau faktor yang menghambat dan mendukung implementasi atau pelaksanaan model tatakelola pemerintahan. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung maka peneliti mewawancara Ruslan Mudzakir selaku carik, Ruslan Mudzakir mengatakan bahwa:

“Terkait dengan tatakelola meskipun belum sempurna tapi kalurahan mencoba secara bertahap, setiap tahun akan ada selalu. tentunya yang tau akan kekurangan dan kelebihan adalah kita sendiri, maka dari itu kalurahan mengundang narasumber dari kapanewon, DPMK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung) 1 atau 2 orang, dalam pengembangan SDM peningkatan setiap tahunnya telah diadakan dengan wujudnya adalah pelatihan dan monitoring kemudian manajemen forum atau fasilitator termasuk alat bantu FGD sehingga bisa membantu dalam memudahkan pelaksanaan tatakelola perencanaan.” (wawancara pada 5 Maret 2024)

Sama halnya yang disampaikan oleh Sugiono, Sugiono mengatakan bahwa:

“kegiatan yang ditanganin baru ada beberapa diantaranya: tempat untuk taman desa (kedungpoh park), kerjasama dengan kantor pos untuk pembayaran pajak dan lain sebagainnya, untuk pupuk menjadi distributor pupuk” (wawancara pada 27 Maret 2024)

Dari wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Ruslan Mudzakir dan Sugiyanto dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendukung dalam proses terciptanya tatakelola pemerintahan kalurahan adalah pemerintahan kalurahan mendukung dengan membuat workshop guna meningkatkan kualitas sumber

daya manusia sehingga pihak pemerintah Kalurahan maupun masyarakat bisa mengelola dan menciptakan suatu tatakelola yang berkualitas. Faktor dukungan juga terjadi dengan adanya Kerjasama yang dijalani oleh Pemerintah Kalurahan melalui BUMKal dengan pihak luar seperti kantor pos dalam mengurus pembayaran pajak

Dalam proses tatakelola tentunya Pemerintah Kalurahan Kedungpoh memiliki hambatan dalam menjalankan proses tatakelola, adapun faktor penghambat maka peneliti mewawancarai Ruslan Mudzakir selaku carik, Ruslan Mudzakir mengatakan bahwa:

“SDM sebenarnya belum mampu dalam “bisa dibodoh-bodozi. Daya dukung SDM masih belum bisa mengelola dengan baik secara maksimal, SDM masih menjadi pr sehingga belum maksimal dalam mengeksplorasi, sehingga jika adanya daya dukung dari SDM maka kita bisa mengelola dengan maksimal yang dimiliki oleh kita” (wawancara pada 5 Maret 2024)

Sama halnya juga dengan apa yang disampaikan oleh Sugiyanto, Sugiyanto mengatakan bahwa:

“dalam perjalanan kami karena kita juga baru, kenapa kita baru berlima, karena mengambil untuk perekutan kita butuh pertimbangan, karena kita memasukan orang lagi belum ada jerih payahnya kita kan kasihan. dalam kami berjalan berlima ini kami berjuang dululah untuk nanti hasil yang kita petik yaitu nanti kalau sudah benar-benar berjalan. (wawancara pada 27 Maret 2024)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Ruslan Mudzakir dan Sugiyanto dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat proses tatakelola pemerintahan kalurahan adalah kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola dan mengeksplorasi potensi yang dimiliki oleh pemerintah kalurahan. Tentunya sumber daya manusia yang dimiliki sangat berpengaruh terhadap keterampilan dalam merencanakan serta melaksanakan agar kebijakan berjalan secara efektif. Ini dibuktikan dalam proses tatakelola pemerintahan kalurahan pada BUMKal yang hanya memiliki keanggotan 5 orang. Peneliti juga menemukan bahwa faktor penghambat dari proses

tatakelola pemerintahan adanya konflik yang terjadi antara Lurah dan juga perangkat desa karena saat proses penelitian, peneliti sempat menanyakan kepada warga setempat terkait keberadaan lurah yang susah ditemui bahkan susah untuk dihubungi. Ini tentunya ada pengaruh politik lokal yang berlebihan sehingga konflik terjadi akibat kepentinggan dan mengganggu proses tatakelola pemerintahan yang berdampak negatif terhadap stabilitas pemerintahan kalurahan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian peneliti dan analisis pada pembahasan bab sebelumnya tentang Model Tatakelola Pemerintahan Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai model tatakelola pemerintahan kalurahan Kedungpoh didapatkan hasil bahwa model pemerintahan dalam tatakelola yang ada di kalurahan kedungpoh adalah *desentralistik*, yang mengarah dengan demokratis yang tinggi dan menjalankan sesuai bidang, karena dalam tatakelola pemerintahan kalurahan kedungpoh berdasarkan prinsip *good government governance*, yakni masyarakat sudah berpartisipasi dalam proses perencanaan melalui MusKal, transparansi dan akuntabel dalam pelaporan, namun dalam efektifitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya belum
2. Dalam implementasi terdapat faktor yang mendukung pelaksanaan dan juga faktor yang menghambat pelaksanaan model *desentralisasi* tatakelola pemerintahan
 - a. Faktor yang mendukung dalam pelaksanaan model desentralisasi tatakelola pemerintahan adalah Pemerintah Kalurahan Kedungpoh mendukung proses tatakelola pemerintahan dengan *workshop* guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga dukungan didapatkan berdasarkan Kerjasama yang dijalin oleh Pemerintah Kalurahan melalui BUMKal dengan pihak kantor pos

- b. Faktor kendala dalam berjalannya model *desentralisasi* tatakelola pemerintahan kalurahan adalah kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola dan mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki sehingga pembaharuan data di *website* kalurahan belum diperbaharui hampir 10 tahun lamanya, belum adanya pembaharuan keanggotan BUMKal, belum adanya pembaharuan data kependudukan sampai pada saat ini yang dalam penelitian ini peneliti menemukan adanya perbedaan terhadap data RPJMKal Kedungpoh 2020-2025 yaitu Data Penduduk per padukuhan yang berjumlah 6.311 orang sedangkan Data Penduduk Berdasarkan Usia 6.306 orang dan juga adanya konflik politik lokal yang berlebihan di pemerintahan Kalurahan sehingga dalam proses tatakelola pemerintahan menjadi terkendala.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ada beberapa saran yang saling berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini harapannya dengan saran ini dapat menjadi referensi Pemerintah Kalurahan Kedungpoh, adapun yaitu:

1. Pemerintah Kalurahan kedungpoh harus lebih efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya potensi yang dimiliki agar proses desentralisasi tatakelola pemerintahan berjalan dengan optimal.
2. Pemerintah Kalurahan Kedungpoh harus memperbaiki komunikasi dan juga tidak mementingkan kepentingkan lain agar setiap kebutuhan masyarakat bisa tersalurkan dengan baik
3. Pemerintah Kalurahan Kedungpoh harus memonitoring dan menjadi fasilitator yang diharapkan mampu mencapai indikator keberhasilan, hal ini dilakukan agar sesuai dengan bidangnya

sehingga ruang diskusi seluruh masyarakat menjadi terbuka dan tersalurkan semuanya.

4. Masyarakat harus lebih giat aktif mengambil peran dalam setiap kegiatan Pemerintahan Kalurahan Kedungpoh agar terciptanya model *desentralisasi* tatakelola pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, 2013. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja SDM Pada PTPN III Persero Tanjung Morawa. Jurnal. Universitas Sumatra Utara.
- Bungin, Burhan. 2013. Metode penelitian sosial & ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan, publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran edisi pertama. Jakarta: kencana prenada media group.
- Eko, Sutoro. (2015). Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: FPPDACCSES
- Eko, Sutoro. 2015. Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Eko Yunanto, Sutoro. 2020. "Ilmu Pemerintahan: Anti Pada Politik, Lupa Pada Hukum, Dan Enggan Pada administrasi." *Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)* 1(1): 1–24.
- Eko, Sutoro. 2021. "Government Making: Rebuilding Government Science." *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)* 2(1): 1–20.
- Gerring, J., & Thacker, S. C. (2008). A Centripetal Theory of DemocraticGovernance. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511756054>
- Hendi Sandi Putra. (2017). *Tatakelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan GOOD Governace Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri*. Jurnal Politik Muda, 6 (2). Pp. 110-119
- Kaufmann et al. (2000). Governance matters. *Finance & Development*, 10–13. <https://doi.org/10.4135/9781446288870.n3>
- Lenny Novianti. (2015). Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah.
- Lexy J. Moleong. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revi, P. 410).
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2015. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pertiwi, A., Dema, H., Mustanir, A., & Anugrah, E. (2021). Penerapan E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Tatakelola Pemerintahan Desa (Studi pada Pemerintahan Desa Bulo Timoreng). *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 9(3), 130-139. <https://doi.org/10.55678/prj.v9i3.508>
- Rante pasang, Apphia, Johannis Eduard Kaawoan, and Franky R.D Rengkung. 2017. "Peran Lurah Dalam Mewujudkan Tatakelola Pemerintah Yang Baik Suatu Studi Di Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung". *Jurnal Eksekutif*

- Salindeho, A. C. (2020) “Tatakelola Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan Di Kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro”, POLITICO: Jurnal Ilmu Politik, 9(2).
- Sedarmayanti, (2012). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, CV Mandar Maju, Bandung.
- Setyowati, E. 2019. Tatakelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM): Studi Tiga Desa Di Kabupaten Malang. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 9:2
- Sofyani, H., Suryanto, R., Wibowo, S., & Widiasuti, H. 2018. Praktik Pengelolaan dan Tatakelola Pemerintahan Desa Dlingo di Kabupaten Bantul: Pembelajaran dari Desa Percontohan. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia.
- Solekhan, Moch. 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang : Setar Press.
- Sugiyanto, 2013, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. (Bandung: ALFABETA)
- Sugiyanto. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyanto (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyanto. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta
- Susila Wibawa, K. C., 2019. Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik. Administrative Law and Governance Journal, Volume 2(2), pp. 218-234. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234>
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2014). United Nations E-Government Survey: E-Government for the Future We Want. United Nations. [https://doi.org/10.1016/S1369-7021\(02\)00629-6](https://doi.org/10.1016/S1369-7021(02)00629-6)
- Utami, L. T., Syafri, W. and Mulyati, D. (2022) “Tatakelola Pemerintahan Kolaborasi Dalam Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil Di Kota Administrasi Jakarta Selatan”, Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ), 3(6), pp. 3683–3694. doi: 10.37385/msej.v3i6.1186.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang RPJMD Yogyakarta Tahun 2022-2027

LAMPIRAN

PENDOMAN WAWANCARA

- 1. Pemerintahan Kalurahan dan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal)**
 - a. Bagaimana kerjasama Pemerintahan Kalurahan dan BUMKal dalam mensejahterakan masyarakat
 - b. Apakah Pemerintahan Kalurahan dan BUMKal dalam mensejahterakan masyarakat sudah mendukung dan berkontribusi penuh
 - c. Bagaimana proses pengambilan keputusan Pemerintahan Kalurahan dan BUMKal dalam mensejahterakan masyarakat
 - d. Bagaimana struktur dan mekanisme kerja Pemerintahan Kalurahan dan BUMKal dalam mensejahterakan masyarakat
 - e. Apakah penegakan hukum terhadap Pemerintahan Kalurahan dan BUMKal dalam mensejahterakan masyarakat sudah ada dan berjalan dengan baik
 - f. Apa saja hambatan pemerintahan kalurahan dan BUMKal dalam mensejahterakan masyarakat
 - g. Bagaimana strategi pemerintahan kalurahan dan BUMKal mengatasi hambatan tersebut
 - h. Apa saja yang menjadi pendukung Pemerintahan Kalurahan dan BUMKal dalam mensejahterakan masyarakat
 - i. Bagaimana strategi pemerintahan kalurahan dan BUMKal dalam mendapatkan bantuan maupun dukungan dalam mensejahterakan masyarakat
 - j. Apa yang diupayakan pemerintahan kalurahan dan BUMKal dalam mensejahterakan masyarakat sehingga berjalan dengan baik
 - k. Bagaimana cara pemerintahan Kalurahan dan BUMKal menyikapi jika terjadi perselisihan pendapat di dalam forum
 - l. Bagaimana strategi BUMKal sehingga bisa menjadi wadah bagi pengembangan maupun pelestarian berbagai kegiatan usaha
 - m. Apakah pemerintah Kalurahan dan BUMKal sering melakukan evaluasi atas setiap kinerja
- 2. Masyarakat**
 - a. Apakah semua yang terlibat mendapatkan perlakuan yang sama tanpa perbedaan baik dari segi agama, suku, ras

- b. Apakah Pemerintahan Kalurahan dan BUMKal sudah melaksanakan kewajiban dalam menunjukkan pertanggungjawaban dari seluruh aktivitas dan kegiatan unit usahanya
- c. Apakah masyarakat mudah mengakses berbagai aktivitas yang memiliki pengaruh pada kepentingan umum
- d. Apa saja dampak BUMKal bagi masyarakat dalam mensejahterakan masayarakat
- e. Apakah pemerintah kalurahan dan BUMKal dalam mensejahterakan masyarakat sudah bekerja sesuai yang diharapkan
- f. Apakah pemerintah kalurahan dan BUMKal mendukung semua kegiatan masyarakat dalam mensejahterakan masyarakat
- g. Apakah pemerintahan Kalurahan dan BUMKal menyediakan tempat untuk kritik dan saran

Dokumentasi Wawancara



(Foto Bersama Pak Ruslan Mudzakir)



(Foto Bersama pak Yusuf Efendi)



(Foto Bersama Pak Sugiyanto)



(Foto Bersama Bu Aries Widyawati)



(foto Bersama pak Basuki)



(Foto Bersama owen rosy)

Tanda Terima Cek Plagiasi



Lumbung Desa STPMD "APMD"
Perpustakaan Sekolah Tinggi Pendidikan dan Pengembangan Desa "APMD"
Jl. Tirobo 377 Gondokusuman Yogyakarta 55255
Email: perpusdesapmd@gmail.com | Tel: +62 851 2700 3177

TANDA TERIMA CEK PLAGIASI

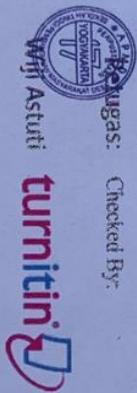
Tanda terima ini menyatakan bahwa Lumbung Desa Perpustakaan STPMD "APMD" telah menerima makalah anda dan telah memeriksanya melalui perangkat lunak Turnitin dengan rangkuman berikut:

Penulis Makalah : VIRGILIUS RAYLUS
Judul Makalah: MODEL TATAKELOLA PEMERINTAHAN
KALURAHAN KEDUNGPOH, KAPANEWON
NGLIPAR, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tanggal pemeriksaan: 15 Juli 2024

Persentase plagiasi: 13%

Plagias: Checked By:



turnitin®



Wijji Astuti

Surat Penunjuk Dosen Pembimbing

